

## MENYOAL TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) LEMBAGA PENDIDIKAN PASCA BENCANA

Agus Darman<sup>1</sup>, Iswantir M<sup>2</sup>  
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: [agus.darman1976@gmail.com](mailto:agus.darman1976@gmail.com)<sup>1</sup>, [iswantir@uinbukittinggi.ac.id](mailto:iswantir@uinbukittinggi.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Bencana alam merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia dan berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kerusakan sarana prasarana, terganggunya proses pembelajaran, serta menurunnya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan menjadi tantangan utama pendidikan pasca bencana. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Total Quality Management (TQM) sebagai pendekatan penjaminan mutu pendidikan dalam konteks pasca bencana alam. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap buku dan jurnal ilmiah yang membahas manajemen mutu pendidikan dan kebencanaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip TQM, seperti fokus pada peserta didik, kepemimpinan kepala sekolah/madrasah, keterlibatan seluruh warga sekolah, perbaikan berkelanjutan, serta pengambilan keputusan berbasis data, relevan diterapkan dalam upaya pemulihan dan peningkatan mutu pendidikan pasca bencana. Penerapan TQM berkontribusi pada terciptanya lembaga pendidikan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Total Quality Management, Mutu Pendidikan, Pasca Bencana Alam, Manajemen Pendidikan.

### ABSTRACT

*Natural disasters are a frequent occurrence in Indonesia and have a significant impact on education. Damage to infrastructure, disruption to the learning process, and a decline in the performance of educators and educational staff are the main challenges facing education in the aftermath of a disaster. This article aims to examine the application of Total Quality Management (TQM) as an approach to quality assurance in education in the context of post-natural disasters. The method used is a literature study of Indonesian books and scientific journals that discuss quality management in education and disasters. The results of the study show that TQM principles, such as a focus on students, leadership of school/madrasah principals, involvement of the entire school community, continuous improvement, and data-based decision making, are relevant to be applied in efforts to restore and improve the quality of education after a disaster. The application of TQM contributes to the creation of resilient, adaptive, and sustainable educational institutions.*

**Keywords:** Total Quality Management, Education Quality, Post Natural Disaster, Education Management.

### A. PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2025, beberapa wilayah Indonesia seperti di Sumatera dilanda bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu oleh curah hujan ekstrem berkepanjangan dan kondisi ekosistem yang tidak seimbang. Bencana ini berdampak signifikan di beberapa provinsi, terutama Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan kerusakan permukiman, infrastruktur jalan dan jembatan, serta korban jiwa dan pengungsian dalam jumlah besar. Laporan situasi menunjukkan bahwa intensitas hujan yang tinggi, kondisi daerah aliran sungai yang kritis, serta degradasi lingkungan di wilayah hulu memperparah laju dan daya rusak banjir bandang tersebut, sehingga pemerintah pusat dan daerah menetapkan status tanggap darurat dan mengerahkan sumber daya lintas sektor untuk penanganan bencana dan pemulihan awal.

Bencana merupakan peristiwa luar biasa yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sektor pendidikan dan layanan publik. Pascabencana, organisasi dihadapkan pada kondisi ketidakpastian yang tinggi, keterbatasan sumber daya, serta tekanan psikologis yang memengaruhi kinerja individu dan sistem. Dalam konteks ini, mutu layanan sering kali mengalami penurunan signifikan karena prioritas organisasi bergeser dari pengembangan mutu menuju pemenuhan kebutuhan darurat.

Lembaga pendidikan sebagai organisasi pelayanan publik sangat rentan terhadap dampak bencana. Kerusakan gedung sekolah, hilangnya fasilitas pembelajaran, terganggunya proses belajar mengajar, serta kondisi trauma peserta didik dan pendidik menjadi tantangan serius dalam menjaga mutu pendidikan. Situasi ini menuntut pendekatan manajemen yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan standar mutu formal, tetapi juga pada aspek kemanusiaan dan keberlanjutan.

Dampak bencana terhadap sistem manajemen mutu bencana menyebabkan terganggunya seluruh komponen sistem manajemen mutu, mulai dari input, proses, hingga output. Standar mutu yang telah ditetapkan sebelum bencana sering kali tidak dapat diterapkan secara optimal karena keterbatasan kondisi, padahal dalam situasi normal saja masih banyak lembaga pendidikan sedang menghadapi banyak persoalan seperti (1) kualitas guru yang belum memadai, (2) terbatasnya sumber daya manusia dan dana, (3) produktifitas lembaga yang kurang bermutu, (4) efisiensi pendidikan yang rendah, (5) relevansi pendidikan dengan dunia kerja, (6) manajemen pendidikan yang masih tradisional, (7) proses pembelajaran yang kaku, (8) sarana prasarana yang belum memadai, (9) perpustakaan yang belum memadai, dan (10) kualitas input dan output yang rendah (Iswantir, 2017). Prosedur baku menjadi sulit dijalankan, target mutu tidak tercapai, dan mekanisme evaluasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kondisi tersebut, pendekatan manajemen mutu yang bersifat kaku berpotensi menimbulkan tekanan tambahan bagi organisasi. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap konsep dan praktik manajemen mutu agar tetap relevan dan fungsional dalam situasi pascabencana.

Total Quality Management (TQM) selama ini dipahami sebagai pendekatan manajemen yang menekankan perbaikan berkelanjutan, kepuasan pelanggan, dan keterlibatan seluruh anggota organisasi. TQM umumnya dikembangkan dalam konteks organisasi yang relatif stabil. Ketika diterapkan dalam situasi pasca bencana, muncul pertanyaan kritis mengenai sejauh mana prinsip-prinsip TQM dapat diimplementasikan secara efektif. Menyoal TQM pasca bencana berarti mengkaji kembali asumsi dasar, prinsip, dan praktik TQM agar tidak menjadi beban normatif, melainkan alat adaptif untuk pemulihan mutu. Artikel ini memandang penting adanya pergeseran paradigma dari TQM normatif menuju TQM adaptif dan resilien.

Kesenjangan teoritik dan praktik kajian tentang TQM banyak membahas implementasi dalam kondisi normal, sementara kajian yang secara spesifik menyoroti TQM dalam konteks krisis dan pascabencana masih terbatas. Di sisi praktik, organisasi sering kali tetap dituntut memenuhi standar mutu tertentu meskipun berada dalam kondisi darurat. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar perlunya penelitian ini.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka. Data dikumpulkan dari jurnal-jurnal nasional berbahasa Indonesia yang relevan dengan tema Total Quality Management (TQM). Analisis dilakukan menggunakan teknik content analysis untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam literatur yang dikaji.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep TQM pada Bidang pendidikan**

Total Quality Management (TQM) merupakan pendekatan manajemen yang berfokus pada upaya peningkatan mutu secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Menurut Nasution (2015), TQM adalah suatu sistem manajemen yang menjadikan kualitas sebagai strategi utama organisasi dan berorientasi pada kepuasan pelanggan melalui perbaikan berkelanjutan terhadap proses, produk, dan sumber daya manusia. TQM tidak hanya dipahami sebagai teknik manajerial, melainkan sebagai budaya organisasi yang menanamkan nilai-nilai mutu dalam setiap aktivitas kerja. Dalam perspektif ini, mutu tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang dijalankan secara konsisten dan sistematis (Sallis, 2012). TQM pada saat ini juga sudah diaplikasikan dalam bidang pendidikan yang mencakup beberapa ruang lingkupnya.

Bidang pendidikan memiliki ruang lingkup yang luas dan kompleks karena mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan proses pengembangan manusia secara terencana dan sistematis. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pembelajaran di ruang kelas, tetapi sebagai suatu sistem yang melibatkan berbagai komponen yang saling terkait dan saling memengaruhi. Oleh karena itu, pendidikan dipandang sebagai proses sosial yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor (Fattah, 2016).

Salah satu ruang lingkup utama dalam pendidikan adalah peserta didik sebagai subjek dan objek pendidikan. Peserta didik memiliki karakteristik, kebutuhan, dan latar belakang yang beragam sehingga memerlukan layanan pendidikan yang adaptif dan berkeadilan. Ruang lingkup ini mencakup perkembangan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, termasuk layanan bimbingan dan konseling serta perlindungan hak-hak peserta didik dalam proses pendidikan (Sukmadinata, 2017).

Selain peserta didik, ruang lingkup pendidikan juga meliputi pendidik dan tenaga kependidikan. Guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga administrasi merupakan unsur strategis yang menentukan mutu penyelenggaraan pendidikan. Aspek ini mencakup kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian guru, serta kinerja tenaga kependidikan dalam mendukung proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Kualitas sumber daya manusia pendidikan menjadi faktor kunci dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan (Mulyasa, 2018).

Ruang lingkup pendidikan selanjutnya adalah kurikulum dan proses pembelajaran. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran, sedangkan pembelajaran merupakan proses interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Aspek ini mencakup perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran, serta sistem penilaian hasil belajar. Mutu pendidikan sangat ditentukan oleh relevansi kurikulum dan efektivitas proses pembelajaran yang dilaksanakan (Sanjaya, 2019).

Manajemen dan kepemimpinan pendidikan juga merupakan bagian penting dari ruang lingkup pendidikan. Manajemen pendidikan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan pendidikan. Kepemimpinan kepala sekolah berperan dalam menggerakkan seluruh sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kepemimpinan yang visioner dan partisipatif terbukti berkontribusi terhadap terciptanya iklim sekolah yang kondusif dan bermutu (Fattah, 2016).

Ruang lingkup pendidikan juga mencakup sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, media pembelajaran, dan teknologi pendidikan. Ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana sangat memengaruhi kualitas proses pembelajaran. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan memadai menjadi

prasyarat penting bagi terselenggaranya pendidikan yang bermutu (Prasojo & Sudiyono, 2015).

Selain itu, pembiayaan pendidikan merupakan ruang lingkup yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan mencakup perencanaan anggaran, sumber pendanaan, penggunaan dana, serta akuntabilitas keuangan pendidikan. Pengelolaan pembiayaan yang transparan dan efisien mendukung keberlanjutan program pendidikan dan peningkatan mutu layanan pendidikan (Anwar, 2017).

Ruang lingkup pendidikan berikutnya adalah penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Penjaminan mutu bertujuan memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kegiatan ini meliputi evaluasi diri, monitoring, supervisi, dan akreditasi. Penjaminan mutu menjadi instrumen penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan (Sallis, 2012).

Pendidikan juga mencakup hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai bagian dari ruang lingkungannya. Partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pendidikan berperan penting dalam mendukung keberhasilan program sekolah. Kemitraan yang baik antara sekolah dan masyarakat dapat memperkuat sumber daya pendidikan serta meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan lingkungan sosial (Tilaar, 2015).

Secara keseluruhan, ruang lingkup bidang pendidikan mencerminkan pendidikan sebagai suatu sistem yang utuh dan terintegrasi. Setiap komponen dalam pendidikan saling berkaitan dan harus dikelola secara sinergis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pemahaman yang komprehensif terhadap ruang lingkup pendidikan menjadi dasar penting dalam pengembangan manajemen mutu, termasuk penerapan Total Quality Management (TQM) dalam pendidikan.

### **Urgensi TQM dalam Bidang Pendidikan**

Penerapan Total Quality Management (TQM) dalam bidang pendidikan menjadi semakin urgen seiring meningkatnya tuntutan mutu pendidikan di tengah dinamika perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, dan persaingan global. Lembaga pendidikan tidak lagi hanya dituntut untuk menyelenggarakan proses pembelajaran, tetapi juga harus mampu menjamin kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan dan akuntabel. Dalam konteks ini, TQM hadir sebagai pendekatan manajemen yang menempatkan mutu sebagai orientasi utama melalui keterlibatan seluruh komponen pendidikan, mulai dari pimpinan, pendidik, tenaga kependidikan, hingga peserta didik (Sallis, 2012).

Urgensi TQM dalam pendidikan juga berkaitan dengan kompleksitas permasalahan mutu yang dihadapi satuan pendidikan, seperti rendahnya capaian pembelajaran, ketidaksesuaian lulusan dengan kebutuhan masyarakat, serta lemahnya sistem evaluasi dan penjaminan mutu internal. Pendekatan manajemen konvensional yang bersifat administratif sering kali belum mampu menjawab persoalan tersebut secara sistemik. Oleh karena itu, TQM diperlukan untuk membangun sistem manajemen pendidikan yang terintegrasi, berorientasi proses, dan berbasis perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) (Fattah, 2016).

Selain itu, TQM menjadi penting karena menekankan prinsip fokus pada pelanggan pendidikan, yaitu peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Kepuasan pelanggan dalam pendidikan tidak hanya diukur dari hasil akademik, tetapi juga dari kualitas proses pembelajaran, layanan administrasi, serta pembentukan karakter peserta didik. Dengan menerapkan TQM, lembaga pendidikan didorong untuk memahami kebutuhan dan harapan pelanggan secara berkelanjutan serta menjadikannya dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pendidikan (Nasution, 2015).

Urgensi TQM juga terlihat dari perannya dalam memperkuat kepemimpinan dan budaya mutu di lingkungan pendidikan. TQM mendorong kepala sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan untuk berperan sebagai pemimpin mutu (quality leader) yang mampu membangun

visi bersama, menumbuhkan komitmen kolektif, dan menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada kualitas. Budaya mutu ini penting untuk memastikan bahwa upaya peningkatan mutu tidak bersifat insidental, melainkan menjadi bagian dari nilai dan kebiasaan organisasi pendidikan (Mulyasa, 2018).

Lebih lanjut, TQM menjadi urgen karena menempatkan sumber daya manusia pendidikan sebagai aset strategis dalam peningkatan mutu. Guru dan tenaga kependidikan didorong untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi mutu pendidikan. Melalui pelatihan berkelanjutan, kerja tim, dan sistem penghargaan, TQM membantu meningkatkan profesionalisme dan kinerja pendidik, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran (Fattah, 2016).

Urgensi TQM dalam bidang pendidikan juga berkaitan dengan kebutuhan akan penjaminan mutu yang sistematis dan berkelanjutan. Dalam era akuntabilitas publik, lembaga pendidikan dituntut untuk mampu menunjukkan kinerja dan mutu layanannya secara transparan. TQM menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan sekolah dan madrasah melakukan evaluasi diri, monitoring, dan perbaikan mutu secara berkesinambungan sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku (Sallis, 2012).

Secara keseluruhan, urgensi penerapan Total Quality Management dalam bidang pendidikan terletak pada kemampuannya membangun sistem pendidikan yang bermutu, adaptif, dan berkelanjutan. TQM tidak hanya berfungsi sebagai alat manajerial, tetapi juga sebagai paradigma pengelolaan pendidikan yang menempatkan mutu sebagai tanggung jawab bersama seluruh warga pendidikan. Dengan demikian, TQM menjadi kebutuhan strategis dalam upaya peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan di Indonesia.

#### Kondisi Lembaga Pendidikan Pasca Bencana

Lembaga pendidikan pascabencana memiliki karakteristik organisasi yang ditandai oleh keterbatasan sumber daya dan terganggunya sistem penyelenggaraan pendidikan. Kerusakan gedung sekolah atau madrasah, hilangnya sarana pembelajaran, serta menurunnya kesiapan psikologis pendidik dan peserta didik menyebabkan proses pendidikan tidak dapat berjalan secara normal. Dalam kondisi ini, lembaga pendidikan dituntut untuk tetap menjaga keberlangsungan layanan pendidikan dasar meskipun dengan fasilitas dan sumber daya yang sangat terbatas (BNPB, 2018; Suryono, 2016).

Selain itu, lembaga pendidikan pascabencana dihadapkan pada tingkat ketidakpastian yang tinggi, baik terkait jadwal pembelajaran, ketersediaan guru, maupun kebijakan darurat dari pemerintah. Ketidakpastian ini menuntut pimpinan lembaga pendidikan untuk mengambil keputusan secara cepat dan adaptif, seperti penyesuaian kurikulum darurat, pengaturan ulang jam belajar, atau penggunaan ruang belajar sementara. Fleksibilitas manajemen dan kemampuan beradaptasi menjadi karakteristik penting agar lembaga pendidikan tetap mampu menjalankan fungsi edukatifnya di tengah situasi krisis (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019).

Dalam konteks pascabencana, fokus lembaga pendidikan bergeser dari pengembangan mutu jangka panjang menuju pemulihan fungsi dasar pendidikan. Prioritas utama bukan lagi pada inovasi pembelajaran atau pengembangan program unggulan, melainkan pada pemulihan akses belajar, pemenuhan hak pendidikan peserta didik, serta penciptaan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Upaya ini mencakup pemulihan kegiatan belajar mengajar, pendampingan psikososial, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga sekolah (Kementerian PPN/Bappenas, 2021).

Lebih lanjut, lembaga pendidikan pascabencana menuntut adanya kecepatan pemulihan yang didukung oleh kolaborasi lintas sektor. Kerja sama dengan pemerintah daerah, BNPB, Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan, organisasi kemanusiaan, serta masyarakat sekitar menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan pendidikan. Sinergi ini diperlukan untuk

penyediaan ruang belajar darurat, bantuan sarana pendidikan, serta pemulihan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga lembaga pendidikan dapat kembali berfungsi secara bertahap dan berkelanjutan (BNPB, 2020).

### **Implementasi Prinsip TQM Pendidikan Pasca Bencana Alam**

Pertama fokus pada peserta didik dan kebutuhan belajar. Dalam konteks TQM pendidikan pasca bencana, peserta didik menjadi fokus utama. Kebutuhan peserta didik pasca bencana tidak hanya terkait dengan aspek akademik, tetapi juga aspek psikososial dan keamanan belajar. Lembaga pendidikan perlu menyesuaikan kurikulum, metode pembelajaran, serta sistem evaluasi agar sesuai dengan kondisi pasca bencana. Kepuasan dan keberlanjutan belajar peserta didik menjadi indikator utama mutu pendidikan (Sallis, 2012).

Kedua kepemimpinan kepala sekolah dalam pemulihan mutu. Kepala sekolah atau madrasah memiliki peran strategis dalam implementasi TQM pasca bencana. Kepemimpinan yang visioner, responsif, dan berorientasi mutu sangat dibutuhkan untuk mengoordinasikan pemulihan sarana prasarana, mengelola sumber daya manusia, serta membangun kembali budaya mutu sekolah. Menurut Fattah (2016), kepemimpinan pendidikan yang efektif mampu menciptakan stabilitas dan kepercayaan warga sekolah dalam situasi krisis.

Ketiga keterlibatan guru dan tenaga kependidikan. TQM menekankan keterlibatan seluruh sumber daya manusia dalam peningkatan mutu. Pasca bencana, guru dan tenaga kependidikan perlu diberdayakan melalui kerja tim, komunikasi terbuka, serta pelatihan adaptif. Keterlibatan aktif guru dalam merancang pembelajaran darurat dan pemulihan mutu pembelajaran menjadi kunci keberhasilan pendidikan pasca bencana (Mulyasa, 2018).

Keempat perbaikan berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Perbaikan berkelanjutan merupakan inti dari TQM. Dalam konteks pasca bencana, evaluasi terhadap kelemahan sistem pendidikan sebelum dan saat bencana perlu dilakukan secara sistematis. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran, manajemen kelas, serta sistem penilaian agar lebih tangguh dan adaptif terhadap risiko bencana di masa depan.

Kelima pengambilan keputusan berbasis data. Pengambilan keputusan berbasis data tetap penting meskipun dalam kondisi pasca bencana. Data mengenai kondisi peserta didik, ketersediaan sarana prasarana, dan capaian pembelajaran menjadi dasar dalam perencanaan pemulihan mutu pendidikan. Pendekatan ini membantu sekolah mengambil kebijakan yang tepat dan berorientasi pada mutu jangka panjang (Fattah, 2016).

### **Tantangan dan Solusi TQM Berkelanjutan dalam Bidang Pendidikan Pasca Bencana**

Penerapan Total Quality Management (TQM) secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan pascabencana menghadapi tantangan utama berupa ketidakstabilan sistem pendidikan. Pascabencana, satuan pendidikan sering mengalami kerusakan fisik, terganggunya proses pembelajaran, serta menurunnya konsistensi layanan pendidikan. Kondisi ini menyebabkan prinsip utama TQM, seperti perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), sulit dilaksanakan secara optimal karena lembaga pendidikan masih berfokus pada pemulihan fungsi dasar pembelajaran (Suryadi, 2018; Hidayat, 2020).

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan budaya mutu. Guru dan tenaga kependidikan pascabencana tidak hanya menghadapi beban kerja tambahan, tetapi juga tekanan psikologis akibat trauma bencana. Situasi ini berdampak pada rendahnya partisipasi aktif warga sekolah dalam menjalankan siklus TQM, seperti evaluasi mutu, refleksi kinerja, dan inovasi pembelajaran. Padahal, keberhasilan TQM sangat bergantung pada keterlibatan seluruh komponen organisasi pendidikan secara konsisten (Rahmawati & Anwar, 2019).

Selain itu, ketidaksinambungan kebijakan dan dukungan kelembagaan menjadi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan TQM pascabencana. Program penjaminan mutu pendidikan sering kali bersifat sementara dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan darurat,

tanpa diikuti dengan kebijakan jangka panjang yang mendukung perbaikan mutu secara sistematis. Akibatnya, implementasi TQM cenderung terhenti setelah fase tanggap darurat dan rehabilitasi awal berakhir (Sutrisno, 2021).

Tantangan lainnya adalah kesulitan dalam melakukan pengukuran dan evaluasi mutu pendidikan secara komprehensif. Pascabencana, indikator mutu pendidikan sering kali mengalami penyesuaian, baik dari segi standar proses, capaian pembelajaran, maupun kepuasan peserta didik dan orang tua. Ketidakteraturan data dan terbatasnya sistem monitoring menyebabkan proses evaluasi mutu tidak berjalan optimal, sehingga prinsip pengambilan keputusan berbasis data dalam TQM sulit diterapkan secara berkelanjutan (Lestari & Wahyuni, 2020).

Penerapan TQM berkelanjutan dalam pendidikan pascabencana memerlukan pendekatan yang adaptif, dukungan kebijakan yang konsisten, serta penguatan budaya mutu yang realistis sesuai dengan kondisi krisis. Tanpa strategi khusus pascabencana, TQM berpotensi menjadi konsep normatif yang sulit diwujudkan secara berkelanjutan dalam praktik pendidikan (Suryadi, 2018).

Penerapan TQM berkelanjutan dalam pendidikan pasca bencana memerlukan pendekatan manajemen mutu yang adaptif dan bertahap. Lembaga pendidikan perlu menyesuaikan prinsip TQM dengan kondisi krisis melalui penetapan standar mutu minimum yang realistis, tanpa mengabaikan semangat perbaikan berkelanjutan. Fokus awal diarahkan pada pemulihan proses pembelajaran inti, kemudian secara bertahap dikembangkan menuju peningkatan mutu yang lebih komprehensif sesuai kapasitas lembaga (Suryadi, 2018; Hidayat, 2020).

Solusi berikutnya adalah penguatan kepemimpinan mutu dan budaya partisipatif di lingkungan pendidikan. Kepala sekolah atau pimpinan madrasah berperan sebagai agen perubahan yang mendorong keterlibatan aktif guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua dalam siklus TQM. Kepemimpinan yang empatik dan kolaboratif pascabencana terbukti mampu memulihkan motivasi kerja serta menumbuhkan kembali budaya mutu sebagai landasan keberlanjutan TQM (Rahmawati & Anwar, 2019).

Selain itu, penguatan sistem evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data menjadi solusi penting dalam menjaga keberlanjutan TQM. Lembaga pendidikan perlu menyederhanakan indikator mutu dan instrumen evaluasi agar sesuai dengan kondisi pasca bencana, namun tetap konsisten dan terukur. Evaluasi berkelanjutan terhadap proses dan hasil pembelajaran memungkinkan lembaga pendidikan melakukan perbaikan mutu secara sistematis meskipun dalam keterbatasan (Lestari & Wahyuni, 2020).

Solusi lainnya adalah penguatan jejaring dan kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari strategi TQM berkelanjutan. Kerja sama dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan, Kementerian Agama, lembaga kemanusiaan, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi sumber dukungan penting dalam pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kapasitas pendidik, serta pengembangan sistem penjaminan mutu. Kolaborasi ini memungkinkan lembaga pendidikan mempertahankan komitmen mutu meskipun berada dalam situasi pascabencana (Sutrisno, 2021).

Solusi TQM berkelanjutan dalam pendidikan pascabencana terletak pada fleksibilitas penerapan prinsip mutu, kepemimpinan yang kuat, evaluasi berkelanjutan, serta sinergi kelembagaan. Pendekatan ini menjadikan TQM tidak sekadar konsep normatif, tetapi sebagai strategi praktis yang mampu menjaga keberlangsungan dan peningkatan mutu pendidikan dalam situasi krisis dan pemulihan (Suryadi, 2018).

#### **D. KESIMPULAN**

Total Quality Management merupakan pendekatan manajemen yang relevan dan strategis dalam konteks pasca bencana alam. Prinsip-prinsip TQM, seperti fokus pada

pelanggan, kepemimpinan mutu, keterlibatan sumber daya manusia, perbaikan berkelanjutan, dan pengambilan keputusan berbasis data, mampu mendukung proses pemulihan dan peningkatan mutu organisasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, TQM dapat dijadikan landasan manajemen untuk membangun organisasi yang tangguh dan berorientasi pada keberlanjutan pasca bencana alam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. I. (2017). Manajemen pembiayaan pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 22(3), 389–402.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2018). Pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). Rencana nasional penanggulangan bencana 2020–2024. BNPB.
- BNPB. (2019). Pedoman penyelenggaraan pendidikan dalam situasi darurat bencana. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Fattah, N. (2016). Landasan manajemen pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, R. (2020). Implementasi manajemen mutu terpadu dalam peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(2), 85–96.
- Iswantir, M. (2017, July). The Empowerment Strategy Of Islamic Education Institution In Global Competition. In *Internasional Seminar On Tarbiyah (ISoT) Fakultas Pendidikan KUIS Selangor Malaysia*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). Panduan penyelenggaraan pendidikan dalam kondisi darurat. Kemendikbud.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). Pedoman perencanaan pemulihan pascabencana. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Lestari, D., & Wahyuni, S. (2020). Penjaminan mutu pendidikan berbasis evaluasi berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 27(1), 44–55.
- Mulyasa, E. (2018). Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, M. N. (2015). Manajemen mutu terpadu (Total Quality Management). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prasojo, L. D., & Sudiyono. (2015). Supervisi pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(2), 87–98.
- Rahmawati, N., & Anwar, M. (2019). Budaya mutu dalam organisasi pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 25(3), 233–242.
- Sallis, E. (2012). Manajemen mutu terpadu pendidikan (Terjemahan). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Sanjaya, W. (2019). Perencanaan dan desain sistem pembelajaran. *Jurnal Pendidikan*, 20(1), 45–56.
- Sukmadinata, N. S. (2017). Landasan psikologi proses pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 23(1), 1–12.
- Sudrajat, A. (2020). Manajemen pendidikan dalam situasi bencana. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(2), 85–96.
- Sutrisno. (2021). Kebijakan penjaminan mutu pendidikan pascabencana. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 14(1), 61–72.
- Suryadi. (2018). Manajemen mutu pendidikan dalam konteks perubahan dan krisis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 23(2), 157–168.
- Suryono, A. (2016). Manajemen penanggulangan bencana. Pustaka Pelajar.
- Tilaar, H. A. R. (2015). Pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 7(2), 134–146.